

## BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Simpulan

Pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk etnis Tionghoa di Jawa pada tahun 1900-1942. Simpulan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada bab I. Adapun pokok rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 'Bagaimana Pola Pelaksanaan Politik Segregasi Pemerintah Hindia Belanda untuk etnis Tionghoa di Jawa tahun 1900-1942'. Untuk membatasi penelitian, maka peneliti membagi ke dalam tiga rumusan masalah. Pertama, peraturan/kebijakan sosial-politik yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk etnis Tionghoa pada tahun 1900-1942? Kedua, bagaimana pola pelaksanaan kebijakan sosial-politik pemerintah Hindia Belanda terkait etnis Tionghoa pada tahun 1900-1942? Ketiga, bagaimana dampak kebijakan-kebijakan sosial-politik pemerintah Hindia Belanda terhadap etnis Tionghoa?.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, sistem *Apartheid*, *Wijkenstelsel* & *Passenstelsel*, dan Kebijakan pendirian *Hollandsche Chineesche School* (HCS) merupakan kebijakan-kebijakan sosial politik yang menjadi sarana bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan politik *divide et impera* atau pecah belah. Pada awal abad ke-20, kebijakan sistem *Apartheid* dan *Wijkenstelsel-Passenstelsel* terus dipertahankan dengan pola pelaksanaan yang tidak jauh berbeda saat diterapkan pada abad ke-19 karena pemerintah Hindia Belanda tidak ingin etnis Tionghoa dan Pribumi bersatu. Pemerintah Hindia Belanda khawatir akan terjadinya suatu masalah serius yang dapat mengganggu eksistensi politik pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Oleh sebab itu, pemetakan hukum yang berbeda serta tempat tinggal yang terpisah dianggap sebuah kebijakan yang perlu dipertahankan dan bahkan perlu diperbarui. Begitupun dalam hal pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908 yang tidak lepas dari politik segregasinya. Pendirian HCS dari tahun 1908 sampai 1942 menjadi suatu sarana politik segregasi Belanda karena dalam hal ini etnis Tionghoa dibatasi pergerakannya agar tidak berinteraksi lebih jauh

dengan Pribumi. Maka dari itu, tidak heran jika hubungan antara etnis Tionghoa dan Pribumi tidak terjalin secara harmonis ketika dan setelah diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut.

*Kedua*, sebagai sarana politik segregasi pemerintah Hindia Belanda, pola pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bersifat diskriminatif. Pola pelaksanaan sistem *Apartheid* yang membagi masyarakat menjadi tiga golongan memposisikan golongan Timur Asing termasuk etnis Tionghoa lebih tinggi derajatnya dari Pribumi. Hukum yang diterapkan baik hukum pidana maupun hukum perdagangan untuk etnis Tionghoa lebih menguntungkan, sehingga sebagian besar penduduk Pribumi Jawa merasakan kecemburuan baik dalam aspek sosial maupun ekonomi yang berakibat semakin tajamnya jurang pemisah antara keduanya. Bahkan tidak sedikit yang berujung pada kekerasan fisik dan huru-hara dengan istilah “anti Cina”. Lalu kebijakan *Wijkenstelsel* memisahkan etnis Tionghoa dari Pribumi karena wilayah pemukiman yang sudah ditetapkan, ditambah kebijakan *Passenstelsel* yang mengharuskan etnis Tionghoa memiliki surat izin untuk keluar dari wilayah tersebut menyebabkan semakin sulitnya etnis Tionghoa berinteraksi dengan Pribumi. Dua kebijakan tersebut menciptakan sebuah mentalita bagi etnis Tionghoa dan solidaritas sesamanya yang menyebabkan semakin eksklusifnya pergaulan mereka, dan enggan bergabung dengan golongan lainnya termasuk Pribumi. Selain itu, dari dua kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya terlihat lebih menguntungkan pemerintah Hindia Belanda selain dari aspek politik. Penempatan wilayah untuk etnis Tionghoa ditunjuk oleh pemerintah setempat di daerah yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi sehingga pemerintah Hindia Belanda dengan mudah mengontrol pergerakan etnis Tionghoa dengan pemusatan kegiatan perekonomian di perkotaan. Pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda terlihat diskriminatif dari pembagian sekolah yang diberikan. Sekolah-sekolah yang diberikan kepada etnis Tionghoa berbeda dengan sekolah Pribumi dengan fasilitas tidak sebaik sekolah-sekolah khusus golongan Eropa. Pendirian HCS merupakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang beralih untuk merespon tuntutan etnis Tionghoa di Jawa untuk diselenggarakannya pendidikan. Di sisi lain, pendirian HCS oleh pemerintah Hindia Belanda adalah agar terciptanya sebuah golongan Tionghoa yang berpendidikan

**Maulana Ainurrahman , 2018**

**ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL-POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA  
UNTUK ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 1900-1942**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Barat yang dikemudian hari akan berguna bagi kepentingan politik pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan terbentuknya sebuah organisasi Tionghoa yang bernama CHH yang pro terhadap pemerintah Hindia Belanda dan berseberangan dengan gerakan politik Pribumi Jawa.

*Ketiga*, kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada penelitian ini berdampak terhadap kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia dalam aspek budaya, ekonomi, dan politik. Memasuki tahun 1900 sampai 1942, etnis Tionghoa tidak dapat berasimilasi secara total dalam hal kebudayaan karena politik segregasi pemerintah Hindia Belanda melalui tiga kebijakannya. Meskipun sebagian dari etnis Tionghoa peranakan di Jawa telah menggunakan budaya lokal, namun hal tersebut tidak sepenuhnya mengakar karena sikap eksklusifitas yang timbul akibat politik segregasi sehingga adanya gengsi sosial antara etnis Tionghoa dan Pribumi. Dalam aspek politik, dampak dari politik segregasi pemerintah Hindia Belanda melalui tiga kebijakan yang telah dijelaskan dapat dilihat dari pergerakan-pergerakan politik etnis Tionghoa dan Pribumi yang hanya mementingkan golongan masing-masing. Contohnya adalah organisasi *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) yang bersifat eksklusif karena pergerakan yang dilakukan sebatas kepentingan etnis Tionghoa, begitupun dengan organisasi pergerakan Pribumi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam yang hanya mementingkan kepentingan penduduk Pribumi dan tidak menganggap etnis Tionghoa sebagai anggotanya. Dalam aspek ekonomi, dampak kebijakan pemerintah Hindia Belanda adalah menimbulkan kesenjangan antara etnis Tionghoa dan Pribumi karena etnis Tionghoa memiliki peran strategis dalam perekonomian Hindia Belanda pada saat itu, bahkan hukum yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk etnis Tionghoa dalam hal perdagangan disamakan dengan hukum orang-orang Eropa. Karena adanya kesenjangan ekonomi, maka sering muncul kecemburuan yang berujung pada kekerasan dan sering muncul istilah “anti Cina”.

## 5.2 Rekomendasi

Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diantaranya :

**Maulana Ainurrahman , 2018**

**ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL-POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA  
UNTUK ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 1900-1942**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

*Pertama*, dewasa ini kita dapat melihat adanya batasan sosial antara etnis Tionghoa dengan pribumi dalam pergaulan sehari-hari. Kita pun bisa melihat adanya gap tersebut dalam hal pendidikan dimana terdapat sekolah swasta yang hanya diisi oleh anak-anak Tionghoa saja. Hal tersebut merupakan akibat dari timbulnya suatu stereotip orang-orang Pribumi yang menganggap etnis Tionghoa sebagai bangsa asing yang “menumpang” hidup dan suka mengeksploitasi dalam hal ekonomi, dan juga anggapan etnis Tionghoa bahwa orang-orang Pribumi yang malas dan suka memeras keuangan etnis Tionghoa, sehingga dalam sepak terjang sejarah Indonesia etnis Tionghoa sering mengalami kerusuhan-kerusuhan rasial. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bagi masyarakat Indonesia pada umumnya lebih memahami bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari Indonesia. Secara historis etnis Tionghoa dulunya telah berasimilasi tanpa adanya gesekan antara satu sama lain, namun semenjak kekuasaan Belanda di Indonesia bangsa-bangsa yang berada di Indonesia pada saat itu di pecah dengan politik segregasinya. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia hasil penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan persatuan bangsa tanpa memandang ras atau etnis serta menghindari konflik-konflik rasial yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, kita harus menghilangkan stereotip yang telah mengakar yang telah dijelaskan sebelumnya hingga memudahkan kita untuk bersatu.

*Kedua*, bagi para pembaca hasil penelitian ini dan tertarik pada ilmu sejarah, hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang bersifat diskriminatif dan memecah belah, sehingga membuat bangsa ini lemah dan mudah untuk dijajah. Oleh karena itu hasil penelitian ini dapat membantu untuk memahami akan pentingnya persatuan bangsa di negara ini karena dengan adanya persatuan maka bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah untuk digoyahkan.

*Ketiga*, bagi pembaca yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan tema yang sama, maka peneliti sarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, karena penjelasan dalam masih secara umum dan jauh dari kata sempurna. Terdapat beberapa yang belum dijelaskan dalam penelitian ini seperti tanggapan langsung dari pihak etnis Tionghoa mengenai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menyebabkan mereka terpisah dari orang-orang Pribumi.

**Maulana Ainurrahman , 2018**

**ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL-POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA  
UNTUK ETNIS TIONGHOA DI JAWA TAHUN 1900-1942**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Selain itu, masih banyak faktor-faktor penyebab pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan tersebut yang belum dijelaskan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.